

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta : Diadit Media.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana.
- Amirudin dan Zinal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Andreae, Fockema. 1983. *Kamus Hukum*. Bandung : Bina Cipta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung : CV Mandar Maju.
- _____. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*. Bandung : Bina Cipta.
- _____. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta : Kencana PrenanaMedia Group.
- Black, Henry Campbel. 1999. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn : West Group.
- Cavadino, Michael dan James Dignan. 1997. *The Penal System An Introduction*. Sage Publicaton Ltd.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Efendy, Mawan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana : Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictionary (Editor in Chief)*. Edisi Kedelapan. ST Paul Minn : West Group.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.

- _____. 2010. *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana : Perbandingan dengan Beberapa Negara*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
- _____. 1984. *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta : Penerbit Pustaka Kartini.
- _____. 2000. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hartono, Sunarjati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Machmudin, Dudu Duswara. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung : Penerbit PT Refika Aditama.
- Manthovi, Reda. 2015. *Penyadapan Vs. Privasi*. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Ketiga)*. Jakarta : Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Moeliatno. *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*. Yogyakarta : Fakultas Hukum UGM
- Moelijono, Anton M., dkk. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Mufiz, Ali. 1985. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta : Karunika.
- Muhammad, Abdukadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta : UII Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : BP. UNDIP.
- Packer, Herbert L. 1968. *Two Models of the Criminal Procces*. Standford : Stanford University Press.
- Raharjo, Satjipto. 1995. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Alumni.

- Setiadji, Edi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Sidharta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung : Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Pross Persidangan*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1979. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Bogor : Politea.
- _____. 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)* . Bogor : Politeia.
- Sofyan, Andi M. Asis, Abd. dan Ilyas, H. Amir. 2020. *Hukum Acara Pidana (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Kencana.
- Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : Penerbit Kepel Press.
- Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : UMM Press.
- Syahroni. Maharso. dan Sujarwadi, Tomy. 2017. *Korupsi : Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Yusni, Muhammad. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Perspektif Kejaksanaan*. Surabaya : Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11/PER/M.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Intersepsi Terhadap Informasi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan Pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal

Binaji, Sigit Herman dan Hartanti. 2019. Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crimes. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 4 No. 1. hal. 157-174.

Fachrunisa, Syifa. 2021. Penyadapan sebagai Bentuk Upaya Paksa dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jurnal Studi Hukum Pidana. Vol. 1 No. 1. hal. 37-50.

Hoesein, Zainal Arifin. 2012. Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan. Jurnal Rechtsinding. Vol. 1 No. 3. hal. 307-327.

Ismail, Nurhasan. 2006. "Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia : Suatu Pendekatan Ekonomi-Politik". Disertasi. Yogyakarta : UGM.

GK, R.M.Bagoes Radityo Kristiwanto, dan Sinaulan, Ramlani Lina. 2021. Kepastian Hukum Penyadapan Penyidikan Kejaksaan Dalam Melakukan Kewenangan Atas Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Vol. 8 No. 5. hal.1639-1654.

- Koloay, Renny N.S. 2016. Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol.22 No.5. hal. 16-27.
- Malik, Faissal. 2019. Pengaturan Norma Eksekusi Terpidana Mati Narkotika Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Cakrawala Hukum*. Vol. 21 No. 2. hal 30-39
- Marbun, Rocky. 2014. Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1 No. 3. hal. 558-577.
- Mas, Marwan. 2013. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisi Pemberantasan Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*. Vol 42 Nomor 1. hal. 71-78
- Prastyono, Rudi Dwi. 2020. Formulasi Pengaturan Intersepsi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Era Digital Oleh Kejaksaan Republik Indonesia. *Lex Renaissance*. Vol. 5 No. 3. Hal. 511-524.
- Raz, Josepz. 1979. *The Rule of Law and Its Virtue, in Authority of Law* (Oxford : Clarendon Press).
- Reksodiputro, Mardjono. 2010. Adakah Ambivalensi Dalam Kita Menghadapi RPP Intersepsi?. *KHN Newsletter*. *Desain Hukum*, Vol. 10 No. 1.
- Reynolds, Noel B. 1989. Grounding the Rule of Law. *Ratio Juris*. Vol. 2 No. 1. hal. 1-16.
- Subagja, Deto Adityan, dkk. 2021. Penyadapan (Wiretapping) Oleh Penyidik Dalam Rangka Mengumpul Bukti Menurut Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 16 No. 2. hal. 261-281.
- Yuliartha, I Gede. 2010. Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Law Reform*. Vol. 5 No.1.
- Yuvens, Damian Agata, dkk. 2017. Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 47 No. 3. hal. 289-311.

Website

- Djuraid, Dhimam Abror. 2023. Sekali Lagi, Cicak Vs Buaya atau Buaya Vs Buaya?. diakses dari <https://www.jpnn.com/news/sekali-lagi-cicak-vs-buaya-atau-buaya-vs-buaya?page=2>, pada tanggal 23 April 2023, pukul 16.17

- Fauzi, Gilang. 2015. Samad Disebut Sadap PDIP, KPK : Kami Tak Sadap di Luar Perkara, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150122194609-12-26696/samad-disebut-sadap-pdip-kpk-kami-tak-sadap-di-luar-perkara>, pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 16.30
- Glo. 2009. KPK : Penyadapan Anggodo untuk Lacak Anggoro. diakses dari <https://otomotif.kompas.com/read/2009/11/04/15103949/kpk-penyadapan-anggodo-untuk-lacak-anggoro>, pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 18.31.
- Indonesia Corruption Watch. 2011 Kejaksaan Resmi Deponering Kasus Bibit-Chandra. diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/kejaksaan-resmi-deponering-kasus-bibit-chandra>, pada tanggal 10 Mei 2023, pukul 10.30.